

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa secara yuridis-normatif, operator Administrasi Kependudukan (Adminduk) di tingkat Kecamatan Dander mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang kuat dan imperatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan doktrin hukum administrasi negara, tindakan operator yang tegak lurus pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dilindungi oleh Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Jika terjadi sengketa atau penolakan terhadap berkas yang tidak sah, berlaku doktrin *faut de service* (kesalahan jabatan), di mana pertanggungjawaban hukum mutlak berada pada institusi (organ), sehingga membebaskan operator dari tuntutan hukum perdata, pidana, maupun administrasi secara personal sepanjang bekerja dengan itikad baik (*good faith*).
2. Bahwa instrumen perlindungan hukum tersebut didesain secara khusus untuk melindungi operator dari segala bentuk tekanan, intimidasi verbal, koersif struktural, maupun ancaman fisik dari masyarakat selaku subjek pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memosisikan masyarakat wajib menaati prosedur legalitas dokumen, sehingga segala bentuk pemaksaan kehendak oleh oknum warga untuk memintas aturan dapat ditolak secara tegas oleh operator tanpa rasa takut akan kriminalisasi atau ancaman keamanan. Perlindungan ini melingkupi dimensi yuridis, fisik, dan psikologis untuk menjaga ketahanan birokrasi di lini terdepan Kecamatan Dander.

B. Saran / Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa saran strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Sosialisasi Regulasi Perlindungan Hukum secara Masif di Wilayah Kecamatan Dander

Direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang bersinergi dengan Pemerintah Kecamatan Dander, untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi, edukasi, dan diseminasi hukum terkait regulasi perlindungan operator. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan secara internal kepada aparatur pelaksana, tetapi yang lebih utama adalah diekstensifikasikan kepada masyarakat luas, perangkat desa, serta tokoh komunitas lokal di wilayah Kecamatan Dander. Langkah ini krusial untuk membangun budaya hukum (legal culture) masyarakat agar memahami bahwa operator dilindungi oleh undang-undang saat menegakkan aturan, sehingga dapat mengikis tindakan intimidasi dan koersif di ruang pelayanan.

2. Peningkatan Kehati-hatian Operator Terhadap Penerapan Asas-Asas Administrasi Pemerintahan dan Pemahaman Hak Perlindungan Diri

Diharapkan kepada seluruh operator Adminduk di Kecamatan Dander agar senantiasa meningkatkan kehati-hatian (prudence) dalam menjalankan tugasnya, dengan selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), terutama Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Operator harus tetap teliti dalam melakukan verifikasi dan validasi data mentah demi menjaga otentisitas dokumen negara. Di sisi lain, operator juga harus lebih

mendalami dan memahami hak-hak perlindungan hukum yang melekat pada diri mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dengan pemahaman yang matang mengenai koridor hukum dan hak perlindungan ini, operator akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ketenangan psikologis, serta ketegasan sikap untuk menolak segala bentuk intervensi ilegal tanpa mengabaikan aspek pelayanan yang prima (*excellent service*).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN LITERATUR HUKUM

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Apeldoorn, L.J. van. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht)*. Terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arifin, Zainal. 2012. *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Praktis Keabsahan Tindakan Aparatur Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjachran. 1992. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Donner, Jan Hendrik. 1953. *Handboek van het Nederlandse Administratief Recht*. Alphen aan den Rijn: Samson.
- Duguit, Léon. 1921. *Sovereignty as a Public Service*. New York: King's Crown Press.
- Friedmann, W. 1990. *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan*. Terjemahan Muhamad Arifin. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hr, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Indroharto. 2003. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kelsen, Hans. 2011. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Locke, John. 1689. *Two Treatises of Government*. London: Awnsham Churchill.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoretis*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, Matthew B., & A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1978. *Beberapa Catatan Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta

Publishing: Yogyakarta.

- Rasjidi, Lili & I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rousseau, Jean-Jacques. 1762. *The Social Contract*. Amsterdam: Marc-Michel Rey.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Liky Amiradhika. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. 2004. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan Struktur Ketatanegaraan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: LAN RI.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamikanya Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Humas.

B. JURNAL HUKUM, TESIS, DAN KARYA ILMIAH

- Anwar, Khairil. 2021. "Perlindungan Hukum Jabatan (*Ambtsbescherming*) Aparatur Sipil Negara dalam Menghadapi Tekanan Publik pada Loker Pelayanan Terpadu." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 14, No. 2: 115-130.
- Budiarto, Agus. 2019. "Tanggung Jawab Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 8, No. 1: 45-62.
- Dander, Slamet. 2023. "Analisis Sosiologis Penolakan Berkas Administrasi Kependudukan yang Tidak Memenuhi Syarat Formal di Tingkat

- Kecamatan." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 5, No. 3: 201-218.
- Gunawan, Hendra. 2020. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Keamanan Fisik Petugas Pelayanan Publik di Daerah." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 4: 390-405.
- Hidayat, Syarif. 2018. "Penerapan Asas Kecermatan Formal Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 dalam Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2: 245-267.
- Kurniawan, Teguh. 2022. "Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 Ditinjau dari Aspek Pemenuhan Perintah Atasan." *Jurnal Hukum Pemerintahan*, Vol. 11, No. 1: 77-93.
- Lestari, Indah. 2024. "Dilema Hukum Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK): Antara Ketepatan Sistem dan Intimidasi Pemohon." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 16, No. 2: 134-152.
- Nugroho, Wahyu. 2017. "Penerapan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4: 820-841.
- Pratama, Aditya. 2023. "Tinjauan Hukum Administrasi Terhadap Ancaman Keamanan Data dan Intimidasi Siber Terhadap Aparatur Loker Publik." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 6, No. 1: 56-71.
- Ramadhan, Rizky. 2022. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Pejabat Administrasi Publik." *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 44, No. 3: 310-326.
- Saraswati, Dian. 2021. "Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Petugas Administrasi." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2: 1210-1233.
- Utomo, Tri Widodo W. 2016. "Membangun Akuntabilitas Birokrasi Melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 13, No. 1: 1-18.
- Wijaya, Andy. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Non-PNS/Tenaga Honorer Pada Instansi Pemerintah Daerah." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2: 412-428.
- Yulianto, Eko. 2023. "Konsekuensi Yuridis Pelaksanaan Feitelijke Handelingen

Tanpa Perlindungan Atasan Langsung." *Jurnal Hukum Tata Usaha Negara*, Vol. 9, No. 2: 89-104.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921).

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354).

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden*

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan*.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bojonegoro*.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tata Kerja, Kedudukan, dan Pelayanan Publik Administrasi di Tingkat Kecamatan Kabupaten Bojonegoro*.

D. SUMBER INSTANSIONAL DAN DOKUMEN LAIN

Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2003. *Modul Akuntabilitas dan Good Governance: Sembilan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: LAN RI.

Ombudsman Republik Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan Pengawasan Pelayanan Publik Terpadu Daerah: Evaluasi Kinerja Petugas dan Perlindungan Aparat di Sektor Adminduk*. Jakarta: Ombudsman RI.

Pemerintah Kecamatan Dander. 2024. *Keputusan Camat Dander tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal Loker Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu*. Bojonegoro: Kantor Kecamatan Dander.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) Terpusat. 2025. *Panduan Teknis Operasional Input Data SIPD-RI bagi Administrator Kecamatan*. Jakarta: Ditjen Dukcapil Kemendagri.